



Jangan Malas Memilah, Buang Hanya yang Organik

Mengawal Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Jogja

Masyarakat di Kota Jogja per 1 Januari 2023 lalu dilarang membuang sampah anorganik ke depo. Warga pun diminta memilah dan memilah sampah rumah tangganya, sehingga yang dibuang ke depo untuk diteruskan ke TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Piyungan, Bantul, benar-benar yang mudah terurai dan ramah lingkungan.

Lalu, bagaimana kesiapan masyarakatnya, implementasi di lapangan, dan apa pandangan pengamat lingkungan terhadap kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Jogja ini? Berikut liputan khusus *Radar Jogja*.

PEMKOT Jogja mengajak masyarakat untuk melaksanakan gerakan zero sampah anorganik, mulai Januari 2023. Gerakan itu diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja No 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik ■

↳ Baca *Jangan...* Hal 7



PILAH DULU: Petugas kebersihan melakukan pemilihan terhadap sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat.



Jangan Malas Memilah, Buang Hanya yang Organik

Sambungan dari hal 1

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Sugeng Darmanto menyebut, sampah sebenarnya adalah persoalan semua orang. "Peraturan perundang-undangan sudah menyebutkan bahwa warga negara atau masyarakat punya kewajiban untuk mengelola sampahnya sendiri," ujarnya.

Sugeng menyebut keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah dengan Perda Kota Jogja No 1/2022. Perda itu mengatur pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari. Sehingga SE Wali Kota Jogja tentang Gerakan Zero Sampah Organik diperlukan untuk mempertegasnya.

Berdasar catatan Sugeng, produksi sampah di Kota Jogja sekitar 360 ton per hari. Hanya sekitar dua persen sampah yang terasap bank sampah. Kemudian sekitar 29 persen dipilah oleh

pemulung, sehingga total volume sampah yang dibawa ke TPST Piyungan sekitar 260 ton per hari. "Komposisi sampah tersebut terdiri atas sekitar 55 persen sampah organik dan sekitar 45 persen sampah anorganik," ulasnya.

Data tersebut menunjukkan urgensi gerakan zero sampah anorganik. Bahkan, Pemkot Jogja memandang sangat penting untuk membatasi sampah anorganik. Mengingat Kota Jogja tidak memiliki tempat pembuangan akhir.

"Kami mendukung TPST Piyungan agar umur teknisnya bisa diperpanjang. Maka gerakan ini (zero sampah anorganik, *Red*) menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh kita semua. Termasuk komponen-komponen di rumah tangga, penggerobak, pelapak, termasuk juga aktivis lingkungan dan semua yang ada di perkantoran," jelasnya.

Sugeng menjelaskan, SE Gerakan Zero Sampah Anorganik meliputi pengelolaan sampah. Diharapkan, masyarakat turut berkontribusi dalam pengurangan

sampah. Dilakukan dengan pembatasan produksi atau timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. "Urutuk penanganan sampah dilakukan dengan pemilahan, pengumpulan, dan penyaluran," sebutnya.

Mengacu SE Gerakan Zero Sampah Anorganik, setiap rumah tangga pun wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik hasil pemilahan diutamakan dibawa ke bank sampah, masing-masing wilayah. Lalu bank sampah membawa sampah anorganik kepada pelapak sampah. Depo sampah/tempat pembuangan sampah sementara hanya untuk penempatan sampah organik. Sampah anorganik dilarang dibuang di depo sampah/tempat pembuangan sampah sementara.

"Pemilahan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya wajib. Kita bisa memilah mana yang organik dan anorganik. Kalau mau lebih jeli lagi, sampah anorganik bisa di-derivasikan lebih dari satu jenis sampah anorganik. Misalnya

dari plastik, kertas, kain dan sebagainya," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuridijaya menyebut, ketergantungan kepada TPST Piyungan di Bantul membuat usianya tak lama lagi. Karena menerima pembuangan sampah dari Kota Jogja, Sleman dan Bantul. Hasil koordinasi dengan Sekretariat Bersama (Bersama) Kartamanutal, tanpa upaya pengurangan sampah yang signifikan, TPST Piyungan hanya bisa digunakan sampai akhir 2023 mendatang. Sedang upaya revitalisasi yang dilakukan Pemprov DIJ, melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, dengan menambah lahan baru, paling cepat beroperasi pada 2026.

"Dengan kondisi seperti itu pada 2024-2025 Kota Jogja tidak bisa membuang sampah," kata Aman. Berfolak dari kondisi itulah, Pemkot Jogja bertekad melakukan Revolusi Sampah di Kota Jogja. Yaitu sampah anorganik harus berhenti di sumber sampah di masyarakat. Tidak boleh ada sampah anorga-

nik yang dibuang ke TPST Piyungan. Aman menyebut sampah dari Kota Jogja yang dibuang per hari mencapai 260 ton. Sebanyak 43 persen di antaranya sampah anorganik. Sisanya 57 persen sampah organik. Nantinya juga disiapkan lahan pengolahan sampah organik di luar kota. "Minimal 40 persen sampah anorganik berhenti di sumber sampah, artinya ke TPST hanya mengirim 150 ton per hari," tambahnya.

Bagaimana dengan sampah organik? Mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jogja itu mengungkap sedang menyiapkan lahan di luar Kota Jogja. Akan dimanfaatkan sebagai lokasi pengo-

lahan sampah organik. Dengan begitu, sampah dari Kota Jogja yang dibuang ke TPST Piyungan akan turun drastis.

"Jika nanti 2026 (TPST) Piyungan sudah full beroperasi ya tetap bisa kita manfaatkan, tapi (Kota Jogja) sudah mengolah sampah anorganik dan punya lahan pengolahan sampah organik sendiri," ungkapnya.

Terpisah, Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Jogja melakukan pemantauan terkait kesiapan warga terhadap gerakan zero limbah anorganik. Salah satu yang didatangi adalah Depo Mandala Krida.

Mereka masih menemukan, ada warga yang belum melaku-

kan pemilahan sampah. Sebab ada sejumlah orang yang membawa sampah dengan dibungkus pada satu karung berwarna putih. "Kami tanyakan pada petugas, katanya ditanyakan apakah sudah dipilah atau belum," ujar Kamba.

Dalam dialog bersama pengelola depo, Forpi menyimpulkan perlu penambahan petugas di depo. Sebab, petugas terbani kerja ganda. Selain mengangkut sampah, juga harus melakukan pemilahan. "Petugas depo yang kami datangi juga berharap ada kesadaran dari semua pihak untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke depo-depo sampah," bebarnya. (fat/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005